

# **Keabsahan Penahanan Ijazah Sebagai *Personal Guarantee* Pembayaran Pendidikan ( Studi Kasus Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Wahyu Adi Mudipurwanto,<sup>1</sup> Muhammad Rashall Rifki Agusta,<sup>2</sup>

## **INTISARI**

Akibat masih bergantung nya pembiayaan yang bersumber dari iuran wajib orangtua atau wali siswa, mengakibatkan satuan pendidikan (terutama satuan pendidikan swasta) menjadikan ijazah sebagai objek jaminan agar orangtua atau wali siswa menunaikan komitmen nya dalam melunasi tunggakan biaya pendidikan terhadap orangtua atau wali siswa yang masih memiliki tunggakan biaya pendidikan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan penelitian perundangan-undangan (guna mengkaji apakah ijazah dijadikan sebagai objek jaminan perorangan) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Tujuan penelitian ini yaitu meneliti apakah ijazah dijadikan sebagai objek jaminan perorangan dan mengetahui solusi yang dapat dilakukan terhadap persoalan tunggakan biaya pendidikan siswa dengan mengambil contoh upaya Pemda Provinsi DIY menyelesaikan persoalan penahanan ijazah yang dilakukan satuan pendidikan di Daerah nya.

Menjadikan ijazah siswa sebagai objek jaminan *personal guarantee* merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan menurut kajian analisis hukum jaminan sebab perbuatan penahanan ijazah yang dilakukan satuan pendidikan telah dilarang dalam hukum positif di Indonesia. Meskipun perbuatan menahan ijazah siswa tidak dapat dibenarkan dalam segi hukum, bukan berarti tidak ada solusi terhadap persoalan kepastian pelunasan tunggakan biaya peserta didik.

Solusi terhadap kepastian pelunasan tunggakan biaya pendidikan adalah membebaskan pelunasan tunggakan biaya pendidikan tidak hanya kepada orangtua atau wali siswa, melainkan kepada negara. Berdasarkan kajian hukum dan HAM negara memiliki peran dalam membantu melunasi tunggakan biaya pendidikan siswa. Salah satu percontohan ialah Provinsi DIY dimana Pemda Provinsi DIY turut membantu orangtua atau wali siswa melunasi tunggakan biaya pendidikan menggunakan skema JKP (Jaminan Kelangsungan Pendidikan).

**Kata Kunci :** Ijazah, *Personal Guarantee*, Pendidikan

---

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

<sup>2</sup> Mahasiswa Program Studi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

# **The Legality of Withholding Diplomas as a Personal Guarantee for Education Payment (Case Study in the Special Region of Yogyakarta Province)**

Wahyu Adi Mudipurwanto,<sup>3</sup> Muhammad Rashall Rifki Agusta<sup>4</sup>

## **ABSTRACT**

*Due to the continued reliance on funding sourced from mandatory parental or guardian contributions, educational institutions (especially private institutions) have resorted to using diplomas as collateral to ensure that parents or guardians fulfill their commitment to pay outstanding education fees.*

*This study employs a normative research method, using a statutory approach (to examine whether diplomas can be used as a personal guarantee) and a case approach. The purpose of this research is to investigate whether diplomas can be used as a personal guarantee and to identify possible solutions to the issue of unpaid education fees by taking the example of the efforts made by the Regional Government of the Special Region of Yogyakarta (DIY) to resolve the problem of diploma withholding carried out by educational institutions in the region.*

*Using a student's diploma as an object of personal guarantee cannot be justified based on an analysis of guarantee law, as the act of withholding diplomas by educational institutions is prohibited under Indonesia's positive law. Although the act of withholding student diplomas is legally unjustifiable, it does not mean that there are no solutions to ensure the settlement of outstanding education fees.*

*A solution to ensuring the settlement of outstanding education fees is to place the responsibility not solely on parents or guardians, but also on the state. Based on legal and human rights analysis, the state has a role in assisting with the payment of students' education arrears. One such example can be found in the Special Region of Yogyakarta (DIY), where the regional government supports parents or guardians in settling outstanding education fees through the Educational Continuity Guarantee (JKP) scheme.*

**Keywords:** Diploma, Personal Guarantee, Education

---

<sup>3</sup> Lecturer at Law Study Program, University of Jendral Achmad Yani Yogyakarta.

<sup>4</sup> Student at Law Study Program, University of Jendral Achmad Yani Yogyakarta.